KERJASAMA PERDAGANGAN MINYAK SAWIT MENTAH (*CRUDE PALM OIL*) INDONESIA-INDIA DALAM KERANGKA *ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA* (AIFTA) (2010-2015)

Silvan Martha Dipta

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur 112-116, Bandung, 40132, Indonesia

E-mail : silvanmarthadipta@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama antara Indonesia dengan India dalam melakukan kerjasama perdagangan minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*) dalam kerangka *ASEAN-India Free Trade Area*. Peneliti juga bermaksud ingin mengetahui bagaimana kerjasama perdagangan bebas tersebut berlangsung, serta ingin mengetahui program dan hasil yang didapat dari terjalimnya kerjasama perdagangan bebas dalam kerangka *ASEAN-India Free Trade Area*.

Metode Penelitian adalah kualitatif. Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui wawancara, studi kepustakaan, observasi, dokumentasi, dan penelusuran data online. Penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Perundingan ASEAN, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Perpustakaan Ali Alatas, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berlakunya AIFTA pada kenyataannya meningkatkan total perdagangan Industri kelapa sawit khususnya komoditi CPO. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya peningkatan dalam total produksi dan ekspor CPO ke India.

Kata kunci : Kerjasama, Perdagangan, Indonesia-India, AIFTA,

Abstract

This study aims to explain the cooperation between Indonesia and India on Crude Palm Oil trade Cooperation in a framework of ASEAN-India Free Trade Area. Writer also intended to learn deeper about how the agreement works, also to learn about the program and the result of how the free trade cooperation could affect both countries.

Writer was using descriptive type of research and using qualitative analysis techniques. This study was researched by interviewing some experts, through ovbservation, gathering data from onlince article and literature sourced books. The aim is to find out and describe in detail the development of particular social phenomenon.

The results of this study indicates that the trade improve industrial commodities export and import between both countries, especially on CPO. This can be seen with an increase in total production and export of CPO to India which is increasing and this increase also influence the increase in Indonesia's CPO exports as a whole. Increase in export can not be separated from the growing demand for palm oil especially from India which is the largest importer of Indonesian CPO.

Key Words : Cooperation, Trade, Indonesia-India, AIFTA

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, ekonomi dan perdagangan semakin mengglobal. Setidaknya, itulah istilah yang sering kita dengar untuk menggambarkan fenomena dunia kontemporer yang ditandai oleh menyempitnya ruang dan waktu, menipisnya batas-batas teritorial negara yang oleh para pendukung ekstrem globalisasi diungkapkan sebagai *state borderless*, serta aliran modal dan juga barang-barang melintasi batas-batas negara. Berbagai faktor penyebab dapat diidentifikasi, di antaranya adalah surplus kapital yang mendorong perluasan investasi di wilayah-wilayah baru yang menjanjikan, baik pasar maupun bahan baku demi surplus lebih lanjut. Selain itu globalisasi ekonomi dan perdagangan juga ditopang oleh ketersediaan infrastruktur yang memungkinkan dilakukannya perdagangan lintas batas negara dalam waktu yang relatif cepat. Revolusi di bidang teknologi komunikasi dan semakin rendahnya biaya transportasi telah menjadi katalis penting globalisasi ekonomi dan perdagangan sekarang ini. Akibatnya, ekonomi negara-negara nasional menjadi semakin bergantung satu dengan yang lain dalam lingkup global. Ini berarti bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi suatu negara tidak dapat dilepaskan dari pengaruhnya terhadap negara lain, demikian pula sebaliknya. Kerusakan ekonomi suatu negara akan dengan mudah menyebar ke negara lain seperti efek domino. Oleh karenanya, suatu negara tidak lagi dapat mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan lingkungan ekonomi global (Winarno, 2014 : 29).

Seperti perdagangan bebas yang terjadi antara Indonesia dan India dalam *ASEAN-India Free Trade Area*. *ASEAN-India Free Trade Area* merupakan perjanjian untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif maupun non tarif, peningkatan akses pasar, jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para anggota yang tergabung dalam *ASEAN-India Free Trade Area* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan India. Menjadi suatu hal yang penting bagi ASEAN untuk menjalin kerjasama dengan India khususnya di bidang ekonomi terkait dengan *Free Trade Area*. Hal ini mengingat munculnya India sebagai kekuatan baru di Asia dan dunia dalam berbagai bidang khususnya di sektor ekonomi. Tercatat India merupakan kekuatan ekonomi nomor tiga terbesar di Asia. India telah melakukan penetrasi pasar berbagai belahan dunia dan juga menanam investasi, dengan mendirikan pabrik perakitan termasuk di sej umlah negara Asia Tenggara (http://www.suara.com/bisnis/2014/04/30/185051/india-negara-dengan-perekonomian-ketiga-terbesar-dunia/ diakses pada tanggal 25 Oktober 2016).

Menjadi penting bagi Indonesia mengingat India menempati urutan ke-11 sebagai negara tujuan ekspor produk non migas Indonesia dengan nilai US$ 1,05 miliar pada 2000 dan menjadi urutan ke-4 dengan nilai US$ 13,42 miliar pada 2011, atau meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 22,17% per tahun. Pada tahun 2000, India merupakan negara asal impor produk non migas Indonesia peringkat ke-14 dengan nilai hanya US$ 440,30 juta naik menjadi peringkat ke-10 pada tahun 2011, dengan nilai sebesar US$ 4,02 miliar, atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,5% per tahun selama 2000-2011. India dengan penduduk terbesar kedua di dunia ini merupakan pasar yang potensial untuk dikembangkan, karena selain potensi konsumsinya yang besar, juga standar kualitas yang diterapkan tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Oleh karena itu, pasar India relatif lebih mudah ditembus dibandingkan dengan negara-negara maju yang cenderung memiliki hambatan non tarif yang lebih banyak dan beragam (http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/RPTP_2013_12.pdf / diakses pada tanggal 25 Oktober 2016).

Ide untuk membentuk perdagangan bebas ASEAN-India sebenarnya pertama kali diusulkan oleh India. Keinginan India itu diungkapkan oleh Perdana Menteri India saat itu, Atal Bihari Vajpayee, dan disampaikan langsung oleh menteri perdagangan India pada saat itu Murasoli Maran dalam *ASEAN Economic Ministers (AEM)-India Consultations* yang pertama pada September 2002, di Brunei Darussalam. Sejalan dengan pernyataan Perdana Menteri India itu, hasil dari kajian gabungan antara *ASEAN-India, Joint Study on AFTA-India Lingkages for The Enhancement of Trade and Investment, (ASEAN-India Joint Study)* merekomendasikan hal yang sama yaitu agar kedua belah pihak membentuk *India-AFTA Regional Trade and Investment Area* (IARTIA) (http://asean.org/?static_post=the_first_asean_economic_ministers_and_the_minister_of_india_consultation_15_september_2002_bandar_seri_begawan_brunei_darussalam-2/ diakses pada tanggal 1 November 2016).

Setelah tercapainya kesepakatan menyangkut semua isi dalam *Framework Agreement*, pada saat itu perjanjian tidak langsung ditanda tangani. Karena India sedang mengadakan pemilihan umum pada April hingga Mei 2009, maka Perdana Menteri India pada saat itu, Manmohan Singh menyatakan akan menunda semua penandatanganan FTA, termasuk antara India dan ASEAN hingga pemilu usai pertengahan Mei 2009 dan pemerintahan yang baru terbentuk. Hal ini kemudian menyebabkan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-India baru ditanda tangani pada 13 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. (http://www.business_standard.com/article/economy-policy/don-t-sign-ftas-till-new_govt_formed_pm_to_ministries_109031000153_1.html/ diakses pada tanggal 1 November 2016).

Setelah berlakunya AIFTA India secara bertahap menurunkan bea masuk atas *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Refined Palm Oil* (RPO) masing-masing dari 80% dan 90% menjadi 37,5% dan 45% selama periode 2009-2019. Adapun data sementara mengenai nilai ekspor minyak kelapa sawit ke India sebelum berlakunya AIFTA yaitu sebagai berikut: Pada tahun 2005 nilai ekspor minyak kelapa sawit ke India yaitu sebesar US$ 901,3 juta, di tahun 2006 sebesar US$ 972,6 juta, di tahun 2007 sebesar US$ 2,180,3 juta, di tahun 2008 sebesar US$ 4 109,1 juta, di tahun 2009 sebesar US$ 3 340,0 juta.

Dan nilai ekspor minyak kelapa sawit ke India setelah berlakunya AIFTA pada tahun 2010 yaitu sebesar US$ 4 340,2 juta, di tahun 2011 sebesar US$ 5 256,4 juta, di tahun 2012 sebesar US$ 4 838,4 juta, di tahun 2013 sebesar US$ 4 281,6 juta dan pada tahun 2014 yaitu sebesar US$ 3 635,3 juta (https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1026/ diakses pada tanggal 25 november 2016)

Menurut Pravin S Lunkad ketua *The Solvent Extractors Association of India*, yang merupakan asosiasi industri perdagangan minyak sayur di India mengatakan, India masih sangat tergantung dengan minyak sawit Indonesia dan meyakini impornya terus bertambah sejalan dengan permintaan yang terus meningkat. Berdasarkan data, permintaan *Crude Palm Oil* (CPO) oleh India pada 2012 sebanyak 7,1 juta ton. Adapun permintaan India 7,1 juta ton pada 2012 itu naik dari 2011 yang sebesar 6,750 juta ton. Sedangkan, produksi *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia pada 2012 sebesar 25,9 juta ton atau naik dari 2011 yang masih 24,1 juta ton. Dia menjelaskan, dengan jumlah penduduk sebanyak 1,2 miliar jiwa, India membutuhkan 18 juta ton minyak nabati dimana 11 juta ton di antaranya berupa impor dan untuk sawit, sebagian besar dari Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 2013, persentase impor minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia masing-masing sebesar 70 persen dan 30 persen dari kebutuhan India. Sedangkan pada 2014, komposisi impor India dari Indonesia dan Malaysia masing-masing 60 persen 40 persen. Adapun penurunan impor *Crude Palm Oil* (CPO) yang dilakukan India ke Indonesia dikarenakan tingginya bea keluar yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia (http://www.antaranews.com/berita/484034/india-akui-tergantung-dengan-minyak-sawit-indonesia/ diakses pada tanggal 29 Oktober 2016).

Dalam peninjauan pada penelitian ini ditemukan beberapa penelitian mengenai kerjasama perdagangan bebas antara Indonesia dan Mitra Wicara ASEAN (ASEAN *Full Dialogue Partner*). Sebagai tinjauan yang pertama yaitu karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul *Perkembangan Ekspansi Perusahaan Otomotif India (Bajaj Auto, Tata Motors, TVS) Di Indonesia* yang di tulis oleh Tapalani Novia, jurusan Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian tersebut membahas mengenai perkembangan ekspansi perusahaan otomotif asal India yaitu Bajaj Auto, Tata Motors, dan TVS setelah berlakunya *Asean-India Free Trade Area* (AIFTA) yang mempengaruhi peningkatan jumlah investasinya di Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasannya mengenai *Asean-India Free Trade Area* (AIFTA) yang terjadi di Indonesia namun perbedaannya adalah fokus penelitian yang ditulis oleh Tapalani Novia yaitu membahas perusahaan otomotif asal India setelah berlakunya *Asean-India Free Trade Area* (AIFTA).

Penelitian kedua yang dijadikan sebagai tinjauan adalah jurnal JOM (Jurnal Online Mahasiswa) Volume. 2, No. 2, yang ditulis oleh Puteri Dwi Lestari, dari Universitas Riau, jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang berjudul *Pengaruh Asean-India Free Trade Agreement (AIFTA) Terhadap Industri Petrokimia Indonesia Pada Sektor Perdagangan*. Jurnal tersebut menjelaskan bagaimana perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan India sebelum dan setelah diimplementasikannya AIFTA khususnya terhadap industri petrokimia di Indonesia. Garis besar dalam jurnal tersebut adalah industri petrokimia Indonesia dibanjiri oleh produk import petrokimia India yang harganya lebih bersaing dibanding dengan produk petrokimia Indonesia, dimana India memiliki tingkat produksi yang lebih tinggi sedangkan Indonesia sebaliknya. Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasannya mengenai perdagangan bebas antara Indonesia dan India dalam *Asean-India Free Trade Area* (AIFTA). Adapun perbedaannya adalah pembahasan yang ditulis oleh Puteri Dwi Lestari lebih fokus mengenai industri petrokimia sedangkan penelitian yang peneliti tulis yaitu mengenai industri *Crude Palm Oil* (CPO).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut yaitu bagaimana kerjasama *ASEAN-India Free Trade Area* (AIFTA) antara Indonesia dan India, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul :

"**Kerjasama Perdagangan Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*) Indonesia-India Dalam Kerangka *ASEAN-India Free Trade Area* (2010-2015)".**

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisa dan pembahasan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: **"Bagaimana Kerjasama Perdagangan Minyak Kelapa Sawit Mentah Antara Indonesia dan India Dalam Kerangka AIFTA (2010-2015) ?".**

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Kesepakatan-kesepakatan dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dan India dalam kerjasama perdagangan AIFTA terutama pada perdagangan minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*) ?
2. Sejauh mana hasil perdagangan yang dialami oleh Indonesia dan India dalam melakukan kerjasama perdagangan dalam rangka AIFTA terutama pada perdagangan minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*) ?
3. Bagaimana prospek kerjasama perdagangan Indonesia-India pasca AIFTA terutama pada kerjasama perdagangan minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*).??

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana kerjasama perdagangan minyak sawit mentah antara Indonesia dan India pasca *Asean-India Free Trade Area* (AIFTA) pada tahun 2010-2015. Serta bagaimana pemerintah Indonesia dan India dalam melakukan kerjasama perdagangan pasca penurunan tarif AIFTA terutama dalam kerjasama perdagangan *Crude Palm Oil* (CPO).

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kerjasama perdagangan minyak sawit mentah antara Indonesia dan India pasca *Asean-India Free Trade Area* (AIFTA).
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja yang disepakati serta upaya Indonesia dan India dalam AIFTA terutama pada perdagangan minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*),
3. Untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana implementasi *Asean-India Free Trade Area* (AIFTA) membantu Indonesia dan India dalam melakukan kerjasama perdagangan terutama pada perdagangan minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*).
4. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana prospek kerjasama perdagangan Indonesia-India pasca *Asean-India Free Trade Area* (AIFTA) terutama dalam kerjasama perdagangan minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*).

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk literatur khususnya dalam mengetahui perkembangan mengenai kerjasama perdagangan antara Indonesia dan India pasca *Asean-India Free Trade Area* (AIFTA) sehingga diharapkan dapat menjadi bahan bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia terutama bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan pengetahuan dan studi empiris khususnya bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional dan umumnya diluar jurusan tersebut, guna menaruh minat untuk memperdalam wawasan terhadap Kerjasama Perdagangan Bebas yang dilakukan oleh Indonesia, terutama terkait dengan perdagangan minyak sawit mentah.

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kerjasama Internasional

Dalam usaha sebuah negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Kerjasama menurut Holsti, yaitu:

> "Kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak" (Betsil, 2008 : 21).

Kerjasama Internasional menurut Joseph Grieco bahwa :

> "Kerjasama internasional hanya berlangsung jika terdapat kepentingan "objektif" dan, oleh karenanya, kerjasama akan berakhir jika kepentingan obyektif ini berubah. Tujuan dari Kerjasama Internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara-negara tertentu dan untuk menggabungkan kompetensi-kompetensi yang ada sehingga tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai" (Sugiono, 2006 : 6).

Dalam hubungan internasional dikenal dengan apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Kerjasama internasional merupakan sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam dunia hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan

tindakan yang unilateral dan kompetitif. Menurut Perwita & Yani dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hubungan Internasional Bentuk-bentuk dalam kerjasama internasional berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan kerjasama antara lain :

> "dibedakan menjadi kerjasama bilateral, multilateral, trilateral dan regional. Sebagai salah satu bentuk kerjasama, kerjasama bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan antara dua buah pihak. Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan bilateral" (Perwita & Yani, 2005 : 33).

Mengenai masalah kerjasama internasional merupakan bukti dari adanya saling pengertian antar bangsa (*international understanding*) sebagai akibat dari adanya interdependensi antar bangsa dan bertambah kompleksnya kehidupan dalam masyarakat internasional (Perwita & Yani, 2005 : 121).).

2.1.2 Perjanjian Internasional

Dalam masyarakat internasional, negara-negara menampakkan kecenderungan untuk mengatur dan menuangkan hubungan-hubungan hukum internasionalnya kedalam bentuk perjanjian internasional. Hal ini disebabkan perjanjian internasional (dalam bentuk tertulis) lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan mapun bagi pihak ketiga. Perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan, tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasional (Mauna, 2005 : 82).

2.1.3 Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi politik internasional secara sederhana dapat pula diartikan sebagai interaksi global antara politik dan ekonomi. lebih lanjut menurut Robert Gilpin dan Roger Tooze mendefinisikan:

> "Ekonomi Politik Internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dan politik internasional, yang muncul akibat berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam sister internasional" (Perwita & Yani, 2005:75).

Selanjutnya konfigurasi pendekatan ekonomi politik internasional adalah tidak tunggal. Artinya, implementasi alat-alat analisisnya dapat dilihat pada sejumlah teori dan konsep-konsep yang mendasari substansi ekonomi politik. Seperti interpedensi, depedensi, keterbelakangan pertumbuhan, perkembangan, pembangunan ekonomi sosial, sistem-sistem ekonomi dan termasuk juga persoalan *power politics*: *realism, idealism, linier* dan strukturalis internasional globalisasi, atau *regionalism* dan lain-lain (Ikbar, 2006:21)

John E. Spero mengemukakan suatu konstruksi berpikir yang berawal dari pengertian politik internasional dan ekonomi internasional guna memahami ekonomi poitik internasional, ia menyadari bahwa:

> "Politik internasional adalah interaksi diantara negara-negara dalam upaya mencapai tujuan masing-masing dan penentuan "*who gets what, when and how?"*. Ekonomi internasional merupakan sebuah perilaku negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Maka, sebenarnya interaksi ekonomi adalah interaksi politik dalam arena internasional yang pada akhirnya dapat dikatakan bahwa hubungan internasional mengandung interaksi yang umumnya bersifat ekonomi-politik internasional" (Spero, 2005:76).

Ekonomi Politik Internasional lalu berusaha untuk mengemukakan bahwa sebenarnya ekonomi mempunyai keterikatan dengan politik (*power*). Ekonomi Politik Internasional secara sederhana dapat diartikan menjadi dua kata yaitu *state* (negara) dan *market* (pasar). Negara dalam hubungannya dengan negara lain pasti berkeinginan untuk memenuhi kepentingannya. Untuk mencapai hal tersebut negara dapat memanipulasi kekuatan pasar untuk meningkatkan *power* dan pengaruh (Gilpin, 2001:77).

2.1.4 Kepentingan Nasional

Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik. Pendekatan Morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II.

Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Morgenthau menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan

pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Demikianlah Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*), yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional (Perwita & Yani, 2005 : 35).

2.1.5 Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Adapun subjek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan (Sobri, 2000:1-2).

Perdagangan internasional dibagi menjadi dua kategori, yakni perdagangan barang (fisik) dan perdagangan jasa. Perdagangan jasa, antara lain, terdiri dari biaya transportasi, perjalanan (*travel*), asuransi, pembayaran bunga, dan *remittance* seperti gaji tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan pemakaian jasa konsultan asing di Indonesia serta *fee* atau *royalty* teknologi (lisensi) (Tambunan, 2000:1).

2.1.6 Regionalisme

2.1.6.1 Definisi dan Klasifikasi Regional

Fenomena globalisasi di satu sisi menjadikan dunia menjadi lebih kecil dan memungkinkan terjadinya penyatuan wilayah baik dalam arti geografi, ekonomi, politik dan budaya. Menurut Louis Cantori dan Steven Spiegel, medefinisikan :

> "Kawasan adalah dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial, sejarah dan perasaan identitas yang seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan tindakan dari negara-negara di luar kawasan."
> (Perwita & Yani, 2005 : 104).

Lebih jauh, mereka membagi *subordinate system* ke dalam tiga bagian, yaitu *core sector* (negara inti kawasan), *peripheral sector* (negara pinggiran kawasan) dan *intrusive system* (negara eksternal kawasan yang dapat berpartisipasi dalam interaksi kawasan). Mereka juga menyatakan, setidaknya ada empat variabel yang mempengaruhi terjadinya interaksi antara negara dalam kawasan, yaitu sifat dan kohesivitas aktor yang akan menentukan tingkat interaksi diantara mereka, sifat komunikasi dalam kawasan, tingkat *power* yang dimiliki aktor kawasan dan struktur hubungan antar aktor dalam kawasan.

2.1.6.2 Bentuk-Bentuk Regionalisme

Kerjasama antar negara-negara yang berada dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan bersama adalah salah satu tujuan utama mengemukanya regionalisme. Dengan membentuk organisasi regional, maka negara-negara tersebut telah menggalang bentuk kerjasama intra-regional. Bentuk tertinggi dari kerjasama ini adalah integrasi ekonomi. Bentuk integrasi ini terbagi kedalam dua tingkat, tingkat pertama disebut sebagai "integrasi dangkal" (*shallow integration*) yang hanya mengacu pada upaya regional untuk mengurangi atau menghapuskan kendala-kendala perdagangan. Sedangkan bentuk kedua berupa "integrasi dalam" (*deep integration*) yang bertujuan untuk mencapai kesatuan ekonomi dan fiscal secara menyeluruh (*full economic and monetary union*).

Bentuk berikutnya adalah "*Inter-regionalism*" dan "*Regional Transnationalism*". Bentuk ini mengacu kepada proses kerjasama yang melibatkan aktor-aktor ekstra regional (termasuk pula aktor-aktor non negara seperti MNC) yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi, politik dan kultural. *Inter-regionalism* juga merujuk kepada perluasan hubungan antar kawasan yang dapat mengambil beberapa bentuk. Pertama adalah hubungan antar kelompok/organisasi regional seperti yang tercermin dalam kerjasama Uni Eropa dan ASEAN.

Bentuk kedua adalah hubungan *bi-regional* (dua kawasan) dan *transregional* (antar kawasan). APEC yang terbentuk 1989 yang merupakan hasil dari bentuk *trans-regional* yang meliputi kawasan Asia Pasifik, Amerika Utara dan Selatan. Kemudian adanya ASEM (*Asia Europe Meeting*) yang merupakan bentuk dari *bi-regional* Asia dan Eropa. Lalu adanya kerjasama antara Eropa dengan Amerika Latin yang tergabung dalam *European-Latin America Summit* yang dibentuk pada 1999, serta *The Africa-EU Summit* antara negara-negara di Afrika dengan Eropa. Dan yang terakhir adalah *The East Asia-Latin America Forum* (EALAF) yang dibentuk pada 2001 antara negara-negara di Asia Timur, Australia, Selandia Baru dan Amerika Latin.

Bentuk ketiga adalah hubungan antara kelompok regional dengan *single power*. Hubungan ini merupakan bentuk campuran yang menyerupai hubungan antar kawasan. Namun dalam banyak kasus hubungan semacam ini kerapkali memakai peranan dominan dalam kerjasamanya. Misalnya, mengenai peran AS yang begitu menonjol dan cenderung dominan

di Eropa dan kadang mengganggu hubungan trans-atlantik AS dengan beberapa negara Uni Eropa.

Dari pemaparan hal diatas, terlihat bahwa regionalisme merupakan fenomena hubungan internasional yang terus berkembang. Konsep ini tidak hanya sebatas membicarakan unsur geografis semata, bahkan dalam banyak kasus, elemen-elemen yang terkait begitu beragam, mulai dari ekonomi hingga politik keamanan. Hal ini tentu saja akan menambah kompleksitas regionalisme sebagai sebuah konsep dan fenomena dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005 : 110).

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan India terdapat saling ketergantungan dimana India yang merupakan negara dengan peringkat ekonomi terbesar ketiga di Asia merupakan peluang besar dan potensi bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dan terbukti dari neraca perdagangan antara Indonesia dan India dimana Indonesia selalu mengalami surplus dalam lima tahun terakhir. Begitu juga India yang tergantung dengan minyak sawit Indonesia, tercatat India merupakan negara pengimpor minyak sawit terbesar kedua bagi Indonesia setelah Tiongkok, dimana pada tahun 2013 70% impor minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan India merupakan dari Indonesia dan pada tahun 2014 impor minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan India 60% berasal dari Indonesia.

Selain itu India juga berkepentingan untuk menjual produk-produk unggulannya terhadap negara-negara ASEAN terutama Indonesia. Produk unggulan India diantaranya besi baja, mesin-mesin, otomotif serta industri kimia dalam produk-produk tersebut India lebih unggul dari Indonesia dan India bertujuan menjadikan Indonesia sebagai target pasar terbesarnya terutama dalam industri otomotif. India melihat Indonesia merupakan negara yang prospektif dalam bidang tersebut. Sehingga menjadi kesempatan bagi India untuk melebarkan pasarnya sesuai dengan visi dan kebijakan luar negeri India yaitu *look east policy*.

Dengan dibukanya perdagangan bebas antara Indonesia dan India yaitu *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* dalam rangka *ASEAN-India Free Trade Area* yang diterapkan pada 1 Oktober 2010 oleh Indonesia, tentu saja ini membuka peluang yang lebih besar bagi Indonesia dan India untuk mengejar kepentingan nasionalnya

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Menggunakan metode penelitian kualitatif, Metode ini dipilih karena penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti di bidang ilmu sosial dan perilaku, penelitian dalam metode ini menyoroti masalah yang terkait dengan perilaku dan peran organisasi, kelompok dan individu. Sesuai dengan penelitian yang akan diteliti, Penelitian ini lebih menyoroti masalah terkait peran dalam organisasi internasional antar pemerintah. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti melakukan analisa data berdasarkan data-data.

3.2 Informan Penelitian.

Teknik penentuan *Purposive*. Teknik *Purposive* ini mempunyai pengertian dimana peneliti akan menentukan pihak-pihak informan berdasarkan tujuan, masalah dan variabel penelitian. Teknik yang digunakan adalah teknik wawancara sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

Berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, peneliti akan bertemu dengan informan dikantor perwakilannnya di Indonesia, dengan narasumber perwakilan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan informan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) serta data-data yang relevan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data.

Terkait dengan terbatasnya informasi ,penelitian ini diperoleh dengan cara studi pustaka (*Library Research*) dan internet di sertai dengan wawancara beberapa sumber sebagai salah satu pengumpulan.

3.3.1 Studi Pustaka

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui tulisan, artikel yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan serta portal berita internasional yang mengangkat *headline* tentang kerjasama perdagangan bebas *crude palm oil* antara Indonesia dan India, serta menelaah teori, opini, membaca buku atau jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti juga menggunakan layanan internet dengan cara mengakses alamat situs informasi online seperti *http://kemendag.go.id/* yaitu situs resmi dari Kementerian Perdagangan RI.

3.3.2 Studi Lapangan

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan. Pelaksanaannya bisa secara langsung,

bertatap muka (*face to face*) dengan orang yang akan diwawancarai atau bisa secara tidak langsung dengan memanfaatkan akses teknologi melalui telepon, internet dan sebagainya. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai narasumber yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti. Narasumber yang terkait dengan judul peneliti yaitu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kedutaan Besar India, Kantor Sekretariat ASEAN, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

3.4 Uji Keabsahan Data.

Peneliti memilih keabsahan data dengan metode triangulasi data untuk mengungkap dan masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian dengan cara mengkonfirmasi data yang di peroleh dari sudut pandang Kementerian Perdagangan RI, staf Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kedutaan Besar India, Kantor Sekretariat ASEAN, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk mengkonfirmasi data yang sudah diperoleh peneliti.

3.5 Teknik Analisa Data.

Menganalisis data dengan menggunakan teknik reduksi data. Artinya, data-data yang diperoleh, baik melalui studi pustaka, penelusuran *online* dan wawancara dengan beberapa narasumber akan dihubungkan dengan teori atau konsep sebagai pijakan atau panduan yang menurut persfektif penelti sesuai dengan keperluan penelitan mengenai kerjasama perdagangan minyak sawit mentah antara Indonesia dan India dalam kerangka AIFTA.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian.

3.6.1 Lokasi Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat di bawah ini sesuai dengan kebutuhan penelitian, diantaranya :

1. Kementerian Luar Negeri RI (Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN).
   Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat.
2. Kedutaan Besar India.
   Jalan Haji R. Rasuna Said Kav 1, Jakarta.
3. Kantor Sekretariat ASEAN
   Jalan Sisingamangaraja No.70A, Jakarta Selatan.
4. Kementerian Perdagangan RI.
   Jl. M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat.
5. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
   Jl. KH. Mas Mansyur Kav 35 Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat .
6. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
   Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta.
7. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia.
   Kampus 4 lantai 7 Jl. Dipati Ukur No.114 Bandung, Jawa Barat.

3.6.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan terhitung dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

4.1 Hasil Penelitian.

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian.

4.1.1.1 Gambaran Umum Negara Indonesia

Dengan populasi sebesar 258 juta jiwa pada tahun 2016, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang dipilih langsung. Ibu kota negara ialah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India (http://indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia diakses pada tanggal 22 Februari 2017).

Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Indonesia pengekspor gas alam terbesar kelima di dunia, meski akhir-akhir ini telah mulai menjadi pengimpor bersih minyak mentah. Hasil pertanian yang utama termasuk minyak sawit, beras, teh, kopi, rempah-rempah, dan karet. Sektor jasa adalah penyumbang terbesar PDB, yang mencapai 45,3% untuk PDB 2005. Sedangkan sektor industri menyumbang 40,7%, dan sektor pertanian menyumbang 14,0%. Meskipun demikian, sektor pertanian mempekerjakan lebih banyak orang daripada sektor-sektor lainnya, yaitu 44,3% dari 95 juta orang tenaga kerja. Sektor jasa mempekerjakan 36,9%, dan sisanya sektor industri sebesar 18,8% (https://www.cia.gov/library/publications/the_world_factbook/geos/id.html/ diakses pada tanggal 10 Februari 2017).

4.1.1.2 Gambaran Umum Negara India

Republik India negara berbentuk Republik Federal, dengan sistem Demokrasi Parlementer adalah sebuah negara di Asia Selatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari satu miliar jiwa, dan adalah negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an. Ekonomi India adalah terbesar keempat di dunia dalam PDB, diukur dari segi paritas daya beli (PPP), dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India, negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia, juga telah muncul sebagai kekuatan regional yang penting, memiliki kekuatan militer terbesar, dan memiliki kemampuan senjata nuklir.

Terletak di Asia Selatan dengan garis pantai sepanjang 7.000 km, dan bagian dari anak benua India, India merupakan bagian dari rute perdagangan penting, dan bersejarah. Membagi perbatasan dengan Pakistan, Republik Rakyat Tiongkok, Myanmar. Bangladesh, Nepal, Bhutan, dan Afganistan. Sri Lanka, Maladewa, dan Indonesia adalah negara kepulauan yang bersebelahan. India merupakan tempat kelahiran dari empat agama utama dunia: Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikhisme. Negara ini merupakan bagian dari Britania Raya sebelum meraih kemerdekaan pada 1947. India memiliki ekonomi yang berada dalam urutan ke-10 dalam konversi mata uang, dan ke-4 terbesar dalam PPP. Dia memiliki rekor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat sekitar 8% pada 2003. Dikarenakan populasinya yang besar, namun pendapatan per kapita India berdasarkan PPP hanya AS$3.262, berada di urutan ke-125 oleh Bank Dunia. Cadangan pertukaran asing India sekitar AS$143 miliar. Mumbai merupakan ibu kota finansial negara ini, dan juga merupakan rumah dari Reserve Bank of India, dan Bursa Efek Mumbai. Meskipun seperempat dari penduduk India masih hidup di bawah garis kemiskinan, jumlah kelas menengah yang besar telah muncul karena cepatnya pertumbuhan dalam industri teknologi informasi (http://www.kemlu.go.id/newdelhi/id/Pages/India.aspx/ndiakses pada tanggal 10 Februari 2017).

4.1.1.3 Gambaran Umum AIFTA

Kedekatan geografis, sejarah hubungan dagang, sifat kebutuhan ekonomi yang saling melengkapi dan kesatuan pandangan telah menciptakan ikatan yang kuat antara India dan ASEAN. India dan ASEAN mempunyai pandangan yang sama terhadap hubungan yang multi-dimensi mencakup aspek politik, ekonomi, energi, pertahanan, strategi, keamanan, dan budaya. Selain itu, kemajuan ekonomi India dan pragmatisme yang berkembang dalam urusan internasional menciptakan suasana yang kondusif bagi kerja sama regional. India Kemitraan strategis yang tumbuh antara kedua belah pihak menjadi sangat penting bagi keamanan nasional kedua belah pihak.

Kerjasama ekonomi dan perdagangan membentuk aspek penting dari kemitraan strategis yang tumbuh antara India dan ASEAN. Kinerja ekonomi India sejak liberalisasi reformasi ekonomi pada tahun 1991 telah membawa perubahan yang signifikan dalam kemitraan, dan kini perekonomian India menjadi semakin terintegrasi dengan para mitra di Asia Tenggara. Laju pertumbuhan ekonomi India sebesar 8,5 persen pada tahun 2004 dan 2005 cukup mengesankan, diikuti dengan tingkat pertumbuhan yang jauh lebih baik sebesar 9,4 persen pada tahun 2006. Itulah sebabnya, India telah muncul sebagai perekonomian kedua belas terbesar ketika diukur dengan ukuran produk domestik bruto (PDB) di tingkat pasar, dan ekonomi terbesar kelima dari segi paritas daya beli (PPP). Selain itu, ada target besar untuk laju pertumbuhan ekonomi India di masa depan.

Perdagangan barang dua arah antara India dan ASEAN telah menunjukkan lompatan signifikan dari US$ 7 miliar pada 2000-01 menjadi US$ 57 milyar pada 2010-11, terjadi peningkatan delapan kali lipat dalam rentang 10 tahun.

Pangsa India dari total ekspor ASEAN meningkat dari 7,49 persen pada tahun 1996-97 menjadi 8,27 persen pada 2010-11, sementara pangsa ASEAN dari total ekspor India telah meningkat dari 7,08 persen pada tahun 1997-98 menjadi 10,86 persen pada 2010-11. Dengan demikian, perdagangan dengan negara-negara anggota ASEAN mencapai sekitar 10 persen dari perdagangan global India sehingga menjadikan ASEAN sebagai mitra dagang keempat terbesar di India setelah Uni Eropa, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Komoditas utama ekspor India ke ASEAN adalah produk pertanian, kimia dan produk-produk kimia lainya, barang teknik, tekstil, dan pakaian jadi, sementara India mengimpor makanan dan produk makanan lainnya, bahan baku makanan, dan barang-barang manufaktur.

4.2 Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Kesepakatan-Kesepakatan Serta Upaya Indonesia dan India Dalam Kerjasama Perdagangan AIFTA

4.2.1.1 Penurunan Hambatan Tarif AIFTA

Upaya pengintegrasian kawasan terdiri dari beberapa tahapan salah satunya yakni tahapan perdagangan bebas diantara anggota dalam *region* tersebut. Integrasi merupakan pendorong dibentuknya perdagangan bebas sebagai upaya meningkatkan perekonomian negara. Salah satu upaya untuk mencapai integrasi pasar adalah melakukan integrasi kebijakan diantara negara yang terlibat.

Demi mencapai, mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai konsep dasar dibentuknya Integrasi ekonomi,

maka Indonesia dan India dalam rangka AIFTA kemudian berkomitmen untuk mengurangi hambatan-hambatan tarif dengan membentuk lima kategori yaitu *Normal Track, Sensitive Track, Special products, Highly Sensitive List dan Exclusion List*, sesuai dengan kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-India *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* dalam rangka *ASEAN-India Free Trade Area (*AIFTA) yang ditanda tangani pada pada 13 Agustus 2009 di Bangkok,Thailand (http://asean.org/joint_media_statement_of_the_sixth_aem_india_consultations_singapore/ diakses pada tanggal 11 Maret 2017).

4.2.1 Hasil Penerapan *ASEAN-India Free Trade Area* (AIFTA) Pada Kerjasama Perdagangan Indonesia-India dan Bagi Industri CPO Indonesia

4.2.2.1 Hasil Penerapan *ASEAN-India Free Trade Area* (AIFTA) Bagi Indonesia Terutama Dalam Industri CPO

Dalam menghadapi perdagangan internasional sudah menjadi kepentingan mendasar Indonesia yaitu mendapatkan keuntungan dengan melakukan penetrasi pasar. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia adalah kegiatan ekspor-impor dalam jumlah besar yang tentunya menjadi sumber pendapatan nasional. Menurut Mendag, AIFTA membuka peluang bagi peningkatan ekspor Indonesia khususnya untuk komoditas seperti sayuran, buah-buahan, lemak dan minyak nabati, coklat, pupuk, bahan samak dan celup, plastik, produk karet, produk kulit, kertas, tekstil dan produk tekstil, batubara, biji tembaga, kaca, perkakas, mesin, otomotif dan lain-lain yang tarifnya diturunkan hingga mencapai 0%. Selain itu penguasaan teknologi informasi dan bidang farmasi dari India dapat dimanfaatkan sebagai proses transfer teknologi bagi para pelaku bisnis.

Bagi Indonesia, AIFTA memiliki arti penting karena India bersedia untuk menurunkan tarif bea masuk komoditas minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan *refined palm oil* (RPO) yang selama ini tidak pernah berhasil disepakati untuk diturunkan baik dalam kerangka perundingan bilateral ataupun regional. Industri CPO merupakan salah satu industri yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia juga menyerap tenaga kerja dan berkontribusi terhadap ekspor nonmigas. Industri CPO merupakan industri yang tidak bisa diabaikan mengingat kekuatan industri ini menyerap tenaga kerja sangat besar. Dengan adanya AIFTA maka bea masuk CPO di India diturunkan secara bertahap. Dari tarif dasar untuk CPO yaitu 80% dan mengalami penurunan sebesar 4% tiap tahunnya. Pada tahun pertama pemberlakukan AIFTA, tarif untuk CPO berkurang menjadi 76% dan menjadi 72% di tahun 2011, hingga seterusnya dan untuk tahun ini menjadi 48%. Hingga tarif terendah diturunkan pada tahun 2019 dengan tarif 37.5% (http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2009/08/13/menteri_ekonomi_asean_dan_india_menandatangani_persetujuan_perdagangan_barang_me_id1_1353754123.pdf/ diakses pada tanggal 9 Maret 2017).

Namun jika dilihat dari statistik jumlah ekspor sebelum dan sesudah berlakunya penurunan tarif AIFTA (Lihat tabel 4.8 dan 4.9, hal 75 dan 76), peningkatan jumlah ekspor CPO Indonesia terhadap India tidak terlalu signifkan, cenderung fluktuatif bahkan mengalami penurunan. Dapat dilihat pada tahun 2009 dimana penurunan tarif belum diberlakukan jumlah ekspor CPO Indonesia yaitu sebesar 5.4 juta ton, namun pada tahun 2011 dimana penurunan tarif dalam rangka AIFTA sudah diberlakukan malah terjadi penurunan jumlah ekspor yaitu menjadi 4.9 juta ton. Perubahan tingkat ekspor CPO Indonesia terhadap India dapat dikatakan disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya yaitu harga CPO dunia yang mempengaruhi bea keluar yang diterapkan oleh Indonesia untuk menambah pemasukan negara serta untuk menekan atau menyeimbangkan jumlah ekspor CPO ke mancanegara salah satunya India. Semakin besar harga CPO dunia semakin besar pula bea keluar yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia kepada eksportir dalam negerinya.

4.2.2.2 Hasil Penerapan *ASEAN-India Free Trade Area* (AIFTA) Bagi India

Kekuatan ekonomi India kini lebih dapat diperhitungkan setelah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. ASEAN menjadi sasaran strategis mengingat secara geografis dekat dengan India sehingga dapat menekan dari biaya pengiriman. Dengan dapat menekan biaya pengeluaran dari segi produksi akan lebih menguntungkan. Dengan diberlakukannya AIFTA produk unggulan India seperti besi baja, mesin-mesin, industri otomotif dan petrokimia dapat lebih mudah masuk bukan hanya ke negara Indonesia melainkan ke 10 negara ASEAN lainnya dikarenakan penurunan tarif dalam produk-produk tersebut mencapai hingga 0%.

ASEAN merupakan pasar penting untuk produk unggulan India seperti besi baja, mesin-mesin, industri otomotif dan petrokimia dikarenakan produk India lebih mudah masuk ke negara-negara ASEAN dengan pertimbangan berdasarkan kesamaan standarisasi nasionalnya dibandingkan dengan negara-negara di Amerika Utara dan Uni Eropa yang standarisasi nasionalnya lebih tinggi (http://thediplomat.com/2016/04/indias-asean-

approach-acting-east/ diakses pada tanggal 9 Maret 2017).

Selain hal tersebut adapun dampak AIFTA bagi India dalam melakukan perdagangan yaitu dapat memenuhi kebutuhan berbagai industri domestiknya tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi seperti salah satunya akan kebutuhan India pada produk minyak kelapa sawit mentah (CPO). India membutuhkan 18 juta ton minyak nabati dimana 11 juta ton diantaranya berupa impor dan dari 11 juta ton tersebut, sebanyak 7,59 juta tonnya berupa minyak dari sawit (http://www.antaranews.com/berita/484034/india-akui-tergantung-dengan-minyak-sawit-indonesia/diakses pada tanggal 9 Maret 2017).

Keinginan India untuk memproleh keuntungan yang lebih tinggi juga didukung dengan strategi India yaitu dengan mendirikan pabrik olahan CPO serta sekaligus mereka dapat menjaga stok CPO untuk beberapa tahun kedepan bahkan India dapat menyimpan cadangan CPO untuk persediaan jangka panjang.

Kebijakan tersebut terus dilakukan India dengan pertimbangan bahwa harga CPO akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya karena semakin banyaknya permintaan. India benar-benar memahami hukum penawaran dan permintaan dalam ilmu ekonomi. Oleh karena itu, India berharap dapat memangkas pengeluaran mereka untuk mengimpor CPO di saat harga CPO membumbung tinggi. Tercapainya kepentingan nasional untuk jangka panjang merupakan tujuan akhir dari kebijakan tersebut. Kepentingan nasional India dalam hal ini yakni terjaganya cadangan CPO untuk kebutuhan industri domestik mereka, berkurangnya biaya yang akan dikeluarkan untuk mengimpor CPO ketika harga CPO semakin tinggi, bertambanya keuntungan dari hasil produk olahan yang bernilai tinggi. Namun disisi lain India kerap mengalami defisit dalam total perdagangan dengan Indonesia.

4.2.3 Kendala Kerjasama Perdagangan Minyak Sawit Mentah (CPO) Indonesia-India Dalam Kerangka AIFTA

4.2.3.1 Kendala Bea Masuk ke India

Sejak April 2005 tarif bea masuk CPO Indonesia ke India dinaikan dari 15% menjadi sebesar 80%. Kebijakan ini memberatkan Indonesia, karena bea masuk produk substitusi CPO lainnya, yakni minyak kedelai cenderung lebih rendah yakni sekitar 45%. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri India juga untuk menekan jumlah import CPO Indonesia serta mengurangi tingkat defisit. Sebagai eksportir terbesar India, Indonesia gusar atas kebijakan pemerintah India.

4.2.3.2 Kendala Non-Tarif India (Kebijakan Persyaratan Kandungan Beta-karoten Untuk CPO)

Sejak September 2003, pemerintah India telah mensyaratkan kandungan *beta-karoten* yang harus dimiliki CPO Indonesia sebesar 500 hingga 2.500 ppm. Kebijakan ini berpotensi menghambat ekspor CPO Indonesia karena Indonesia belum mampu menghasilkan produk CPO dengan kandungan seperti itu. Sehingga hal ini mendorong Indonesia aktif bernegosiasi terhadap pemerintah India hingga disepakatinya penurunan kadar minimum *beta-karoten* CPO Indonesia menjadi sebesar 250 hingga 2.500 ppm. Pemerintah Indonesia juga berterima kasih kepada penurunan batas minimum kandungan beta carotene CPO yang awalnya 500 ppm menjadi 250 ppm. Namun, kandungan karoten Indonesia masih kurang apabila dibandingkan dengan Malaysia, yakni sudah mencapai nilai sebesar 600 sampai dengan 2.500 ppm. Lebih lanjut dari hasil investivigasi, kebijakan persyaratan minimum kandungan *beta-karoten* ini tidak murni berasal dari Pemerintah India tetapi dari pihak Malaysia yang merasa sudah mampu akan persyaratan tersebut dan berambisi mengungguli Indonesia di Pasar CPO India.

4.2.4 Prospek Kerjasama Perdagangan CPO Indonesia-India Dalam Kerangka *ASEAN-India Free Trade Area* (AIFTA)

Diproyeksikan perekonomian India akan terus mengalami peningkatan. Selain itu pengaruh India di ASEAN semakin terlihat pada sektor ekonomi dengan masuknya India sebagai mitra dagang ketujuh terbesar. Saat ini India merupakan pangsa pasar yang cukup besar dengan jumlah penduduk sekitar 1,2 milliar dengan tipe masyarakat yang konsumptif. Dengan pertimbangan ekonomi seperti diatas, maka sangat besar kemungkinan perekonomian India akan sangat mempengaruhi ekonomi negara-negara di ASEAN khususnya dimasa depan. Beberapa hal yang menjadikan perjanjian ini penting bagi Indonesia yakni: perdagangan India-

Indonesia terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan perdagangan Indonesia dengan Tiongkok, Australia dalam kerangka kerjasama *Free Trade Area* dan Indonesia masih mengalami defisit. Selain itu point penting dari kerjasama ASEAN-India ini yakni setidaknya kerjasama ini dapat menjadi penyeimbang atas pengaruh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan Tiongkok yang terlebih dahulu masuk melalui beberapa kesepakatan.

5 KESIMPULAN.

Kesepakatan *ASEAN-India Free Trade Area* (AIFTA) merupakan kesepakatan dalam penurunan tarif bea masuk secara bertahap sejak tahun 2010 dan dilaksanakan oleh seluruh anggota ASEAN termasuk Indonesia dan India. Mulai diimplementasikan sepenuhnya berupa penerapan tarif 0% sejak 1 Januari 2010. Namun baru dilakukan 1 Oktober 2010 oleh Indonesia dan India. Dalam implementasi perdagangan bebas AIFTA khususnya kesepakatan antara Indonesia dan India terlihat Indonesia lebih mendapatkan surplus terutama di bidang non migas dan setelah diberlakukannya AIFTA total perdagangan terlihat meningkat dibandingkan sebelum diberlakukannya AIFTA.

Penurunan Tarif untuk CPO dilakukan secara bertahap dari tarif sebelum berlakunya AIFTA yaitu 80% pada tahun 2009, hingga tarif terendah yaitu 37,5% pada tahun 2019. Penurunan tarif berkurang 4% setiap tahunnya namun setelah diberlakukannya AIFTA, peningkatan jumlah ekspor Industri kelapa sawit khususnya komoditas CPO Indonesia terhadap India tidak terlalu signifikan, cendrung fluktuatif bahkan mengalami penurunan. Adapun peningkatan ekspor tidak terlepas dari kebutuhan domestik India akan CPO yang terus meningkat setiap tahunnya, dan penetapan ambang batas harga bea keluar CPO sebesar US$ 750 per metrik ton mempengaruhi penurunan dan peningkatan jumlah ekspor ke India.

Strategi serta upaya kebijakan pemerintah dalam menghadapi AIFTA guna melindungi industri kelapa sawit yaitu dilakukan dengan menaikkan bea keluar CPO. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan harapan dapat memperoleh keuntungan yang besar seiring dengan tingginya permintaan CPO yang juga turut meningkatkan harga komoditas tersebut. Dan hasil bea keluar tersebut nantinya akan digunakan untuk pengambangan infrastrktur serta hilirisasi CPO. Kebijakan kenaikan bea keluar oleh pemintah Indonesia pada awalnya sempat menekan volume ekspor CPO secara keseluruhan, namun untuk ekspor CPO ke India tetap mengalami peningkatan meski hanya kurang dari 1 juta ton. Akan tetapi, kebijkaan tersebut tidak selamanya menekan besarnya ekspor CPO ke berbagai negara, buktinya selama tahun 2011 ekspor CPO Indonesia mengalami peningakatan sampai tahun 2015 meskipun ada sedikit penurunan di tahun 2014.

Daftar Pustaka

Acuan artikel dalam buku:

Amir, M.S. 2002 *Kontrak Dagang Ekspor*, Jakarta, Penerbit PPM

Anda, O Michael. 2000. *Michael International relations in contemporary Africa*. Boston: University Press of America.

Apridar. 2009. Ekonomi Internasional: *Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Betsill, Michele M and Elisabeth Corel (Ed). 2008. *NGO Diplomacy: The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations*. Cambridge: The MIT Press

Bhatia & Mishra, 2015. "*The Peacok & The Garuda" An Overview of India-Indonesia Relations.*New Delhi: KW

Gilpin, Robert. 2001. "*The Study of International Political Economy" dalam Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton. Princeton University Press

Hadiwinata, Sugeng. 2002. *Politik Bisnis Internasional*. Yogyakarta : Kanisius.

Holsti, K. J. 2006. *Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis*. Jakarta: Erlangga

Ikbar, Yanuar. 2006. *Ekonomi Politik Internasional*. Bandung. Angkasa.

Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jervis, Robert. 2005. *American foreign policy in a new era*. New York: Routledge New

Marbun, Marsedes. 2003. *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Mas'oed, Mochtar. 2003. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3S.

Acuan artikel dalam website:

AIFTA, Ancaman Sekaligus Keuntungan Bagi R I. http://economy.okezone.com/read/2010/05/17/320/333492/aifta-ancaman-sekaligus-keuntungan-bagi-ri

Asean-India Free Trade Area, Status / Progress. http://fta.miti.gov.my/index.php/pages/view/asean-india/

ASEAN-India Segera Tuntaskan Materi Perjanjian Kerjasama Perdagangan Bebas. http://www.esdm.go.id/berita/37umum/2112-asean-india-segera-tuntaskan-materi-perjanjian-kerjasama-perdagangan-bebas-.pdf

Awal Oktober 2010, AIFTA Berlaku Efektif. http://economy.okezone.com/read/2010/10/21/320/385052/awal-oktober-2010-aifta-berlaku-efektif?utm_source=br&utm_medium=referral&utm_campaign=news

Crude Palm Oil Futures End Of Day Settlement Price. http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=palm-oil&months=300

Don't Sign Ftas Till New Govt Formed: PM To Ministries. http://www.business-standard.com/article/economy-policy/don-t-sign-ftas-till-new-govt-formed-pm-to-ministries-109031000153_1.html/

Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan 2000-2014. https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1026

India Akui Tergantung Dengan Minyak Sawit Indonesia. http://www.antaranews.com/berita/484034/india-akui-tergantung-dengan-minyak-sawit-indonesia/